

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sarbaini dan Nazaruddin (2023)	Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Laju Inflasi di Indonesia	Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sumber data sekunder berasal dari BPS	Subsidi BBM memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi. Hal ini karena kenaikan subsidi pemerintah berdampak pada inflasi, karena ketika subsidi BBM pemerintah rendah, harga BBM naik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap inflasi, dikarenakan tingginya inflasi membuat perekonomian masyarakat menurun, tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan angka kemiskinan
2.	Davina Putri Ardhita, Najwa Amalia Ilyas, Febryan Saputra, dan Hendra Kurniawan (2022)	Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia	Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima negara Timur Tengah yang merupakan pemasok minyak memiliki tensi geopolitik yang tinggi. Hal ini membuat pasar khawatir jika suplai minyak akan berkurang dan berdampak pada harga minyak yang akan meningkat. Kenaikkan harga BBM membuat masyarakat merasakan dampaknya. Sebagai warga negara kita perlu tahu hak dan kewajiban demi menjaga stabilitas bangsa. Dalam kasus kenaikan BBM, hak yang perlu diterima adalah bantuan subsidi BBM, namun bantuan ini tidak diperuntukkan untuk semua

				kalangan. Kewajiban yang perlu dilaksanakan yaitu membiasakan budaya hidup hemat, mengurangi kegiatan diluar rumah dan membudayakan bertransportasi non BBM. Penulis memberikan saran bagi pemerintah dan masyarakat.
3.	Musdalipa (2021)	Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Sumber: Hasil Analisa peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan yang dijadikan keunikan dari penelitian ini, yang pertama adalah pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hanya menggunakan wawancara serta observasi dalam pengambilan datanya. Selain itu juga dampak yang dirasakan masyarakat secara nyata berdasarkan pendapat dari masyarakat itu sendiri.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu

bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang bagi win-win dan sebuah tuntutan dapat diakomodasi, pada akhirnya ruang bagi win-win sangat terbatas sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah zero-sum-game, yaitu menerima yang ini, dan menolak yang itu.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik.¹³

Menurut Frank T. Paine dan William Naumes pada buku *Strategy and Policy Formation: An Integratif Approach* yang dikutip oleh¹⁴ dalam bukunya *Kebijakan Publik, Proses pembentukan kebijakan publik (policy formation)* melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah.

Ada perbedaan yang penting yang perlu diperhatikan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Di negara-negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara-negara maju adalah lebih kompleks. Perbedaan ini disebabkan salah satunya adalah oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Di negara berkembang di mana perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elite politik dengan pengaruh

¹³ Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal. 30-31.

¹⁴ *Ibid*, h. 92

masyarakat luas yang sedikit, seperti di Kuba dan Korea Utara, maka proses perumusan kebijakan cenderung lebih sederhana. Sementara itu, di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat di mana setiap warga negara mempunyai kepentingan terhadap kebijakan publik negaranya, maka kondisi ini akan mendorong struktur yang semakin kompleks.¹⁵

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu system yang terdiri dari input, conversion, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik/feedback dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut. Apabila kebijakan tersebut memberikan insentif, maka masyarakat akan mendukungnya.¹⁶

Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut bersifat disinsentif, misalnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) atau pajak, maka masyarakat akan melakukan tuntutan baru, berupa tuntutan penurunan harga BBM dan penurunan pajak. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Karena

¹⁵ Ibid, hal. 123-124

¹⁶ Mohammad Ihsan, 2010, Kebijakan Publik: Dalam Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 25.

disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik.

David Easton memberikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat membuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang masuk ke dalam apa yang oleh Easton disebut sebagai “Authorities in a political system”, yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.¹⁷

Mekanisme pemerintah dalam menetapkan pematokan harga dan menentukan tarif upah dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah sesungguhnya tidak diperkenankan berbuat sewenang-wenang mengikuti kehendaknya sendiri. Akan tetapi, pemerintah mesti melakukan negosiasi, diskusi, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk dengan pihak pemasok dan penyalur barang.¹⁸

Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif diimplementasikan.¹⁹ Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu

¹⁷ Ibid, hal. 30

¹⁸ Ibid

¹⁹ Varma, 1992, Teori Politik Modern, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 27

mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem.

Masukan-masukan (input) yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan itu dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya.²⁰

David Easton mengemukakan beberapa ciri sistem politik.²¹

a. Sifat identifikasi

Untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:

1) Unit-unit sistem politik

Unit-unit sistem politik adalah aksi-aksi politik yang biasanya membentuk diri dalam peran politik dan kelompok politik. Aksi-aksi politik dimasukkan setiap tindakan yang terkait dengan kekuasaan politik dalam masyarakat.

2) Batas-batas sistem politik

Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya, maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik.

b. Input dan output sistem politik

Agar sistem politik selalu bekerja melahirkan output, maka setiap sistem politik memerlukan input (masukan) terus-menerus dari masyarakat. Tanpa input suatu sistem politik tidak dapat bekerja, seterusnya tanpa output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut. Salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas sistem politik adalah kuantitas dan kualitas input dan output sistem politik tersebut.

c. Diferensiasi suatu sistem

Dalam praktik, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan dimana unit-unit yang sama melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang sama.

d. Integrasi sistem politik

Jika unit-unit sistem politik melakukan aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan masalah yang muncul adalah bagaimana membawa aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan itu ke dalam tingkat artikulasi minimal yang diperlukan bagi sistem politik agar tidak hancur sewaktu memproduksi hasil. Untuk itu, sistem harus memiliki mekanisme (mengintegrasikan) atau yang memadukan merangsang para anggotanya untuk bekerjasama dalam kadar minimal agar mereka dapat mengambil keputusan mengikat.

Sistem politik bukanlah pemikiran ilmu biasa, pemikiran ini lahir dari sebuah gagasan yang mendalam. Sehingga perjalanan politik sebagai suatu

bagian terpenting di dalam kehidupan manusia. Salah satu unsur yang ada pada sebuah negara adalah sistem politik. Sistem politik mengatur bagaimana dinamika proses pengambilan kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, semakin teratur sistem politik suatu negara apakah semakin efektif pengambilan suatu keputusan dan penyelenggaraan negara. Sistem politik berbeda antara satu negara dengan negara lain dan sistem tersebut bekerja dari prosesnya kematangan di suatu masyarakat.

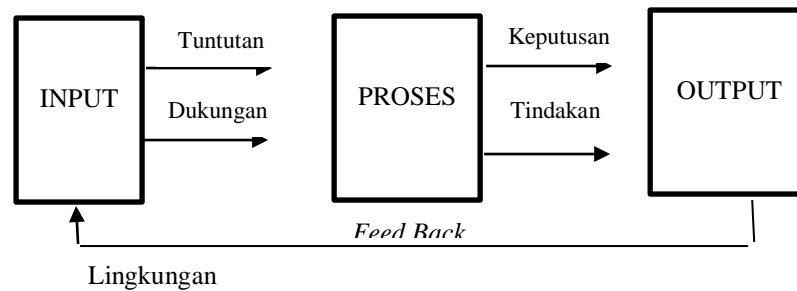
Berbicara mengenai urusan politik, memanglah tak akan ada habisnya. Karena tujuannya juga banyak dan bercabang sesuai dengan kepentingan masing-masing hal tersebut bukan tanpa alasan. Dari semua tujuan politik pasti mempunyai tujuan bagi kebaikan negaranya. Disamping itu pula ada sistem politik yang berlaku. Sistem politik itu terbentuk karena ada sistem antara infrastruktur dan suprastruktur di dalamnya. Infrastruktur diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari NGO atau LSM, pers dan sebagainya. Sedangkan suprastruktur yaitu lembaga yang ada di dalam pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka kaitannya dari sistem yang sudah terbentuk memiliki fungsi yang berkaitan untuk menciptakan output kesejahteraan rakyat namun memiliki kepentingan masing-masing.

Almond dalam Amelia Haryanti mengatakan bahwa pendekatan struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, bagian dari subsistem merupakan sisi kehidupan manusia.

Menurut David Easton sendiri sistem politik adalah interaksi yang abstrak dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Easton mengamati kehidupan politik sebagai suatu jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Adapun unsur dalam sistem politik merupakan tindakan yang ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Input dalam sistem politik berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang kemudian di konversi dan menjadi output (keputusan atau kebijakan).

Tanpa adanya input sistem politik tidak akan berjalan. Lebih dari itu, tanpa adanya output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Dalam praktiknya, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan yang mana komponen yang sama melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang bersamaan pula.

Dalam politik, ditemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing misalnya, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Selanjutnya, integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan dan kegiatan sistem politik. Integrasi dalam suatu sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggota untuk bekerjasama walau dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.



Gambar 2.1 Model Teori Sistem David Easton

(Sumber: Easton dalam Miriam Budiarjo)

Dari gambar tersebut terdapat dalam sistem politik secara umum yaitu input, proses, output. Dapat dilihat bahwa bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali mempengaruhi input.

Dari penjelasan di atas bahwasannya aktor-aktor atau pemeran dalam proses perumusan kebijakan merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam sistem. Banyak hal yang mempengaruhi sistem para aktor untuk memutuskan arah kebijakan yang ada. Tekanan sosial politik, kondisi ekonomi, komitmen yang sudah terbentuk, waktu yang terbatas merupakan faktor pembuat keputusan. Itu sebabnya banyak kajian yang mengkaitkan produk kebijakan dalam sebuah sistem politik. Secara singkat faktor tersebut dianggap pula sebagai penentu partisipasi politik. Dari penjelasan di atas penulis berasumsi bahwa sebuah sistem dapat bekerja jika sistem yang ada di dalamnya saling berkontribusi satu sama lain untuk kepentingan bersama. Jika salah satu sistem terjadi ketimpangan maka

sistem tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tercerai berai.

Dari pernyataan diatas bahwa suatu negara mempunyai sistem untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan adanya sebuah input berupa penghubung komunikasi dari bawah ke atas yakni anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan kepada penguasa politik. Sehingga dapat terjalinnya arus komunikasi informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Begitu pula sebaliknya penguasa dapat menjalin komunikasi yang baik dengan menyampaikan kembali pesan-pesan yang diterima dari masyarakat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang diputuskan. Dengan demikian interaksi antara organisasi dengan lingkungannya dapat memberikan pengaruh maupun yang menerima pengaruh menjadikannya sebuah organisasi masyarakat menjadi perumus dan pelaksana usaha mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Kebijakan Kenaikan BBM Berdasarkan peraturan kebijakan kenaikan harga berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.02/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. kesatu Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. minyak solar (gas oiltj) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Kedua Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Ketiga, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

2.2.3 Kenaikan Bahan Bakar Minyak

Pengertian bahan bakar minyak (BBM) Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi dari bahan bakar adalah melalui reaksi eksotermal dan reaksi nuklir (seperti Fisi nuklir atau Fusi nuklir).

Hidro karbon (termasuk di dalamnya bensin dan solar) sejauh ini merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan manusia. Bahan bakar

lainnya yang bisa dipakai adalah logam radioaktif, makanya dari itu bahan bakar minyak terutama solar, premium dan pertamax menjadi bahan bakar minyak yg sangat diincar masyarakat luas dan menjadi bahan bakar unggulan yang di beli setiap hari sebagai bahan bakar kendaraan, maka oleh karena itu kenaikan harga bbm sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama golongan menengah kebawah terutama untuk bahan bakar premium.

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas” Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu Crude Oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu Natural Gas.

Pengertian minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i The Petroleum (Tax Code, 1997) negara India. Pasal 3 Huruf i berbunyi sebagai berikut: *“Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or extraction,*

including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas’. “

Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa- senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen (kamus besar Bahasa Indonesia, 100:205-301). Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas :

1. Bensin penerbangan
2. Bensin motor
3. Bahan bakar jet
4. Kerosin

5. Solar
6. Minyak diesel dan
7. Minyak bakar

Adapun jenis-jenis bahan bakar dapat dibedakan menjadi tiga menurut wujudnya, yakni cair, padat di antaranya:

1. Bahan bakar cair (BBM)

Minyak (petroleum) berasal dari kata-kata: Petro = rock (batu) dan leum = oil (minyak) Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran molekul carbon dan hydrogen yang disebut dengan hydrocarbons

2. Bahan bakar padat adalah suatu materi padat yang dapat diubah menjadi energy. Contohnya adalah batubara

3. Bahan Bakar Gas

Sedangkan Bahan bakar gas terdapat beberapa daftar jenis-jenis bahan bakar gas yang secara alami didapatkan dari alam:

1. Gas alam
2. Metan dari penambangan batu bara
3. Bahan bakar gas yang terbuat dari bahan bakar padat
4. Gas yang terbentuk dari batu bara
5. Gas yang terbentuk dari limbah dan biom
6. Dari proses industri lainnya (gas blast furnace)
7. Gas yang terbuat dari minyak bumi
8. Gas petroleum cair (LPG)
9. Gas hasil penyulingan

10. Gas dari gasifikasi minyak

11. Gas dari proses fermentasi

Bahan bakar bentuk gas yang biasa digunakan adalah gas petroleum cair (LPG), gas alam, gas hasil produksi, gasblast furnace, gas dari pembuatan kokas, dan lain-lain. Kenaikan bahan bakar minyak merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan alasan tidak lepas dari naiknya harga minyak dunia dan defisit APBN, naiknya minyak dunia dan terjadinya defisit APBN oleh suatu Negara sehingga hal demikianlah yang dijadikan sebagai alasan mengapa harga bahan bakar minyak dinaikkan, jika dilihat dari satu sisi, mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak memang tepat.

Tetapi seharusnya pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil padahal pemerintah menyadari bahwa Indonesia ini adalah diantara Negara termiskin dengan puluhan rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan, olehnya itu semestinya pemerintah lebih bersikap realistis terhadap kondisi warganya. Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan banyak hal sebelum menaikkan bahan bakar minyak.

2.2.4 Respon Masyarakat

Respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak acuh terhadapapa yang disampaikan oleh komunikator oleh pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persolan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau

tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu.²²

Respon mempunyai dua bentuk, yaitu :²³

- a. Respon positif yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.
- b. Respon negatif yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis.

Respon adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil akhir dari adanya stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi dua, yaitu:²⁴

- a) Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat kesadaran.
- b) Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu yang bersangkutan.

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negative. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk

²² Soerjono Soekanto, 1993, Kamus Sosiologi, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 48

²³ Ibid

²⁴ Bimo Walgito, 1980, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 16-17

menjauhi objek tersebut. Respon merupakan reaksi terhadap stimulus yang terbatas pada perhatian persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut. Respon akibat adanya rangsangan, kedua adalah respons pasif yaitu rangsangan yang tidak disertai oleh tindakan.

Masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu.²⁵ Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisisikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-pengelompokkan yang lebih kecil. Masyarakat sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:²⁶

a. Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum ada dua orang yang hidup bersama.

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesankesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi

²⁵ Abdulsyani, 2015, Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta Hal. 3

²⁶ Soerjono Soekanto, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 54

dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Sistem kehidupan bersama menimbulkan menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya.